

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Dengan melihat dinamika politik Timur Tengah dari awal berdirinya sampai sekarang tidak ada akhirnya. Maka dari itu penulis mengangkat kembali konflik antara Israel - Palestina yang tidak berhasil meraih solusi yang baik walaupun telah mengalami pergantian Kepala Negara. Konflik antara Palestina – Israel juga disebabkan oleh pergantian Kepala Negara dan juga berdirinya Negara Israel di tanah Arab. Hal ini menyebabkan orang Arab warga Palestina terusir dari negaranya. Aksi terror Israel dimaksudkan untuk mengusir orang Palestina dari tanah airnya dengan tujuan tanah itu untuk membangun pemukiman orang Isreal. Hal itu menyebabkan Palestina seakan menjadi pengungsi dari tanah airnya sendiri.

Pergantian pimpinan Negara Israel tidak merubah kondisi pertikaian yang terjadi antar keduanya. Perundingan sering diadakan namun proses perdamaian yang sudah disetujui selalu dilanggar oleh salah satu negara. Perdamaian yang dihadapi Palestina masih harus menempuh jalan panjang. Perdamaian disini sering terinterpretasi kedalam ideologi. Konsep perjuangan yang berbeda oleh masing – masing kelompok yang ada. Konflik yang terjadi antara Israel – Palestina seakan telah menjadi konflik abadi yang tak kunjung berakhir mesti telah berulang kali diupayakan dengan perundingan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penulis memutuskan untuk penulisan skripsi ini berjudul :

**“Politik Luar Negeri Israel Era Pemerintahan PM Ariel Sharon terhadap Palestina 2003-2004 (Studi Kasus : Penarikan Pemukim Yahudi di Jalur Gaza)”**

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk lebih mengenal dan menganalisa konflik – konflik yang terjadi antara Israel – Palestina khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan garis keras dan kebijakan Ariel Sharon.
2. Penerapan dari seluruh mata kuliah yang penulis dapat ketika duduk dibangku perkuliahan.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 yaitu Sarjana Ilmu Politik ( S.IP ) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Ariel Sharon merupakan salah satu tokoh yang paling kontroversial dalam sejarah politik Israel. Ariel Sharon yang lahir di Kfar Mala pada 27 Februari 1928, dikenal dengan pendekatan garis keras dalam masalah konflik Israel-Palestina.

Sebelum Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri Israel (tahun 2001 & 2003), dia telah aktif dalam dunia politik di Israel.<sup>1</sup>

Bagi bangsa Arab, Sharon adalah arsitek dibelakang segala hal buruk dalam sejarah Israel: pembantaian, perang, pengingkaran perjanjian, dan ekspansi permukiman Yahudi di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Bangsa Palestina, misalnya, punya julukan khusus bagi Ariel Sharon Sang Penjagal.<sup>2</sup>

Tapi, hasil pemilu tahun 2001 dan 2003 menunjukkan, Sharon berhasil memenangkan kepercayaan warga Israel. Di mata pemilihnya, Sharon boleh jadi dipandang sebagai jawaban terhadap ketakutan Yahudi Israel pada bangsa Arab. Sebagaimana dulu, sebagai pahlawan perang. Ariel Sharon berhasil memenangkan Israel. Kini para pemilih berharap Sharon bisa melindungi Israel dari ancaman tetangga Arabnya.

Ketika Ariel Sharon menjadi anggota Knesset pada tahun 1977, dia masuk kedalam partai Likud yang memenangkan pemilu dengan Perdana Menteri Menachem Begin. Ariel kemudian ditunjuk sebagai Menteri Pertanian. Dengan posisinya tersebut Ariel Sharon mulai membangun pemukiman-pemukiman di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Walaupun ditentang oleh partai-partai sayap kiri tetapi tindakannya juga mendapat dukungan dari partai-partai sayap kanan.<sup>3</sup> Dengan

---

<sup>1</sup> <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/sharon.htm>, "Ariel Sharon", diakses pada tanggal 22 September 2006

<sup>2</sup> [www.gatra.com/2001-02-27/artikel](http://www.gatra.com/2001-02-27/artikel), "Jagal Andalan Bangsa Yahudi", diakses pada tanggal 20 September 2006

<sup>3</sup> <http://www.counterpunch.org/sharon.html>, "The Crimes of Ariel Sharon", diakses pada tanggal 22 September 2006

permukiman-permukiman baru kaum Yahudi ini, Sharon ingin menjamin kedaulatan Israel atas wilayah jajahannya. Pada 1980-an, Sharon adalah otak di belakang “impor” kaum Yahudi Etiopia ke Israel.<sup>4</sup>

Salah satu tindakan paling kontroversi Ariel Sharon adalah ketika ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Perdana Menteri Menachem Begin (1981-1983). Dengan berdalih mengusir pejuang PLO pimpinan Yaser Arafat, Ariel Sharon memberikan perintah penyerbuan besar-besaran ke kamp pengungsi Sabra dan Shatila di kota Beirut, Lebanon. Komando penyerbuan itu disusun secara rahasia oleh Sharon dan tanpa sepengetahuan Knesset. Akibatnya Ariel Sharon diberhentikan oleh Perdana Menteri Menachem Begin.

Peristiwa Sabra Shatila menewaskan lebih dari 1000 orang Palestina di Beirut Barat, Lebanon. Pembantaian tersebut tepatnya terjadi pada tanggal 16 September 1982 oleh pasukan milisi Phalangist dukungan Menteri Pertahanan Ariel Sharon. Maka dengan ini, Sharon termasuk dalam daftar orang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun demikian, ia tetap terpilih menjabat pemerintahan selanjutnya.<sup>5</sup>

Setelah peristiwa itu, Ariel Sharon memang dianggap sebagai politisi yang “tak mungkin terpilih”. Para pendukungnya di Partai Likud bahkan sempat menganggapnya “terlalu ekstrem” dan “terlalu tua”. Tak mengherankan, terpilihnya

---

<sup>4</sup> [www.gatra.com/2001-02-27/artikel](http://www.gatra.com/2001-02-27/artikel), “Jagal Andalan Bangsa Yahudi”, diakses pada tanggal 20 September 2006

<sup>5</sup> <http://electronicinfada.net/forreference/keyfigures/sharon.html>, “Prime Minister of Israel Minister of Immigrant Absorption (Likud)”, diakses pada tanggal 22 September 2006

Sharon sebagai Perdana Menteri Israel disebut-sebut sebagai salah satu *comeback* paling menarik dalam khazanah politik modern.

Tahun 1990-1992, Sharon diangkat menjadi Menteri Konstruksi dan Perumahan dan juga duduk sebagai Kepala Komite Kementerian Imigrasi dan Absorpsi. Pada tahun tersebut, Uni Soviet mengalami kejatuhan sehingga mengakibatkan gelombang Imigrasi masyarakat Yahudi yang besar dari Rusia. Ariel Sharon kemudian menambah dan melanjutkan lagi pembangunan pemukiman-pemukiman Yahudi, termasuk pembangunan 144.000 apartemen.<sup>6</sup>

Semua tindakan Sharon itu ternyata tak cuma menjaga berlanjutnya penjajahan Israel, melainkan juga berhasil meningkatkan citra politik Sharon. Banyak warga Israel menjadi pendukung fanatiknya. Bagi para pengagumnya, Ariel Sharon adalah bulldoser, atau “Raja Yahudi”. Padahal, sikap keras kepala Sharon juga sering menimbulkan masalah bagi Israel.

Ketika pemerintahan Israel dipegang oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada tahun 1996-1999, Ariel Sharon menjabat sebagai Menteri Infrastruktur Nasional dan dengan jabatannya tersebut ia memberikan akses seluas-luasnya untuk pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki sejak perang 1967. Tindakan Sharon menjadi sasaran kutukan dari negara-negara Arab.

---

<sup>6</sup> <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/sharon.html>, “Ariel Sharon”, diakses pada tanggal 22 September 2006

Pada tanggal 28 September 2000, Ariel Sharon (Ketua partai Likud) melakukan kunjungan ke Masjid Al Aqsa yang kemudian ikut memicu Intifada II (Intifada Al Aqsa).<sup>7</sup> Intifada Al Aqsa adalah gelombang aksi kekerasan Israel-Palestina sebagai akibat dari kunjungan kontroversial Ariel Sharon pada tanggal 28 September 2000 dan gagalnya KTT Camp David II bulan Juli 2000 untuk mencapai kesepakatan final antara Israel-Palestina. Karena peristiwa tersebut maka Perdana Menteri Ehud Barak kalah dalam pemilu 6 Februari 2001 dan digantikan oleh Ariel Sharon. Ariel Sharon resmi dilantik menjadi Perdana Menteri pada tanggal 7 Maret 2001.

Pada bulan Maret 2002 pasukan Israel melakukan agresi besar-besaran ke kota-kota di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Agresi militer itu sebagai balasan atas serangkaian bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang Palestina dengan target militer Israel atau rakyat sipil Israel. Agresi militer tersebut juga menghancurkan semua kesepakatan Oslo yang telah tercapai dan sebagai bukti dari pendekatan garis keras Ariel Sharon. Pada tanggal 29 Maret 2002 pasukan Ariel Sharon dengan tank-tanknya mengepung Yasser Arafat dimarkasnya di Ramallah.

Walaupun dengan tindakan Israel yang terus menduduki dalam waktu cukup lama kota-kota Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza tetapi gelombang balasan terutama bom bunuh diri Palestina terus berlangsung. Kelompok-kelompok garis keras Palestina seperti Hamas, jihad Islami selalu mencari cara untuk menyerang baik

---

<sup>7</sup> <http://www.guardian.co.uk/israel/story/0,2763,554625,00.html>, "Blood flows again in the Holy City", diakses pada tanggal 21 September 2006

ke penduduk atau tentara Israel dengan menggunakan bom bunuh diri. Dalam 6 tahun terakhir sejak kunjungan Ariel Sharon ke kompleks Masjid Al Aqsa yang mengakibatkan Intifada Al Aqsa tercatat sebanyak 4342 korban meninggal dari Israel dan Palestina. Sebanyak 3334 berasal dari orang Palestina sisanya 1008 berasal dari orang Israel. 82 % korban meninggal Palestina adalah warga sipil.<sup>8</sup>

Media massa Arab, baik menurut tulisan editorial, opini, maupun karikturnya, tak henti-hentinya menghujat AS, dan menuduh Washington telah memberi lampu hijau kepada PM Israel Ariel Sharon untuk melancarkan agresinya ke kota-kota dan desa-desa Palestina di Tepi Barat yang kini menyebabkan terjadinya tragedy di kamp pengungsi Jenin, kompleks kota lama di kota Nablus, Gereja kelahiran Yesus Kristus di Betlehem serta tentunya markas besar Yasser Arafat sendiri di Ramallah.<sup>9</sup>

Pada bulan April 2003, Presiden AS, George W. Bush mengeluarkan rencana perdamaian antara Israel dan Palestina yang dinamai "Road Map". Road Map menekankan berdirinya negara Palestina pada tahun 2005 dan Israel secara berdampingan dan didukung oleh Uni Eropa, Rusia, PBB terutama AS. Dalam "Road Map" juga disebutkan bahwa pemerintahan Israel harus membekukan seluruh konstruksi perumahan di pemukiman Yahudi di Jaluir Gaza dan Tepi Barat serta

---

<sup>8</sup> <http://electronicintifada.net/v2/artikel3131.shtml>, "Sharon and Abbas Hold Summit, Call For End of Violence", diakses pada tanggal 21 September 2006

<sup>9</sup> Musthafa Abd. Rahman, *Jejak-Jejak Juang Palestina : DariOslo Hingga Intifadah Al Aqsa*, Kompas, Jalarta, Agustus, 2002, hal. 281.

mengundurkan diri secara bertahap dari zona-zona otonomi Palestina yang didudukinya sejak terjadinya konflik.<sup>10</sup>

Rencana perdamaian “Road Map” tersebut muncul untuk mengembalikan citra buruk AS di mata Internasional sehubungan dengan konflik Israel-Palestina yang semakin memburuk serta untuk mendapat dukungan dari negara-negara di Arab berkaitan dengan serangan besar-besaran AS ke Irak pada bulan Maret 2003.

Kemudian pada tanggal 2 Februari 2004, Ariel Sharon yang terpilih sebagai PM Israel untuk yang ke 2 kalinya pada pemilu 28 Januari 2003, secara mengejutkan mengeluarkan kebijakan menarik semua pemukim Yahudi dari pemukiman-pemukiman Yahudi yang berjumlah 21 yang juga merupakan rumah bagi sekitar 8000 pemukim Yahudi yang hidup di antara 1,3 juta orang Palestina dari Jalur Gaza serta 300 pemukim Yahudi lainnya dari 4 pemukiman kecil di Tepi barat bagian Utara sebagai tambahan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/20062.htm>, “A Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict”, diakses pada tanggal 20 September 2006

<sup>11</sup> <http://www.guardian.co.uk/story/0,2763,1137220,00.html>, “Has Sharon moved from villain to visionary?”, diakses pada tanggal 22 september 2006

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari permasalahan yang ada, penulis akan mencoba untuk merumuskan sebuah permasalahan yaitu :

**Mengapa PM Ariel Sharon yang dikenal sebagai seorang yang sangat sulit berkompromi dengan Palestina, melunak setelah terpilih sebagai Perdana Menteri pada Pemilu 2003 yang kedua kalinya dengan membuat kebijakan akan menarik pemukim Yahudi di Jalur Gaza ?**

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Teori pembuat keputusan untuk menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan. Batasan politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah :

*Politik Luar Negeri merupakan strategi/rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi Negara lain/unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasionalnya yang spesifik, dituangkan dalam terminology kepentingan nasionalnya.*<sup>12</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh Plano dan Olton tersebut, terlihat empat unsur dalam politik luar negeri, yaitu strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal, dan kepentingan suatu negara. Jadi Politik Luar Negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut.

---

<sup>12</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *The Internasional Relation Dictionary*, 3<sup>rd</sup> ed. (England: Lio Press Ltd., 1982), hal. 7.

Teoretisi hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri yaitu Graham T. Alisson, mengajukan tiga model untuk mendiskripsikan proses pembuatan keputusan luar negeri. Yakni *Model I : Aktor Rasional*, *Model II : Proses Organisasi*, dan *Model III : Proses Birokratik*.<sup>13</sup> Dalam penulisan ini penulis memilih *Model III : Proses Birokratik* untuk menjelaskan kebijakan yang diambil Israel pada era PM Ariel Sharon tersebut. Dalam Model ini politik luar negeri dipandang sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. Politik luar negeri hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai actor dan organisasi. Ini melibatkan permainan tawar-menawar (*bargaining games*) diantara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan luar negeri adalah *proses sosial*, bukan proses intelektual. Politik luar negeri muncul dari proses politik normal berupa tawar-menawar, kompromi, penyesuaian diri, dan sebagainya.<sup>14</sup>

### **Model III : Proses Birokratik**

Kegagalan KTT Camp David bulan Juli 2000 untuk mencapai kesepakatan final antara Israel-Palestina yang disebabkan oleh kunjungan kontroversial Ariel Sharon ke Masjidil Al Aqsa yang mengakibatkan meletusnya gelombang aksi kekerasan Israel-Palestina Intifada Al Aqsa pada tanggal 28 September 2000. Serta agresi Israel ke wilayah Palestina pada tanggal 29 Maret 2002 (Operation Defensive

---

<sup>13</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu hubungan Internasional Disiplin Ilmu dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 234.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 236-237.

Shield). Mengundang tekanan dan kritikan internasional terhadap Ariel Sharon. Ditambah lagi dengan tindakan Ariel Sharon membangun tembok pembatas yang direncanakan akan mengelilingi wilayah Tepi Barat ketika selesai juga tidak kalah dalam mendapatkan kutukan dan kritikan internasional.

Selama masa pemerintahan Ariel Sharon pada tahun 2001 ketika Ariel Sharon untuk pertama kalinya menjadi Perdana Menteri Israel dan ketika ia terpilih lagi pada 2003, Sharon telah mendapatkan berbagai macam kritikan dan tekanan internasional yang luar biasa karena cara garis kerasnya dalam menagani perlawanan Palestina.

Pada bulan April 2003, Presiden AS, George W. Bush mengeluarkan rencana perdamaian antara Israel dan Palestina yang dinamai "Road Map". Road Map menekankan berdirinya negara Palestina pada tahun 2005 dan Israel secara berdampingan dan didukung oleh Uni Eropa, Rusia, PBB terutama AS.

Roadmap merupakan bentuk perwujudan tekanan-tekanan Internasional yang ditujukan kepada pemerintahan Ariel Sharon agar memulai kembali kesepakatan final antara Israel dan Palestina sejak Perundingan Final Camp David II tahun 2002. Yang mana gagal akibat kunjungan kontroversial Ariel Sharon ke Masjidil Al-Aqsa tanggal 28 September 2000.

Salah satu syarat utama untuk mencapai kesepakatan final antara Israel-Palestina adalah Israel Harus menarik sejumlah besar pemukim Yahudi di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Keputusan penarikan Sharon ditujukan untuk setidaknya mengurangi

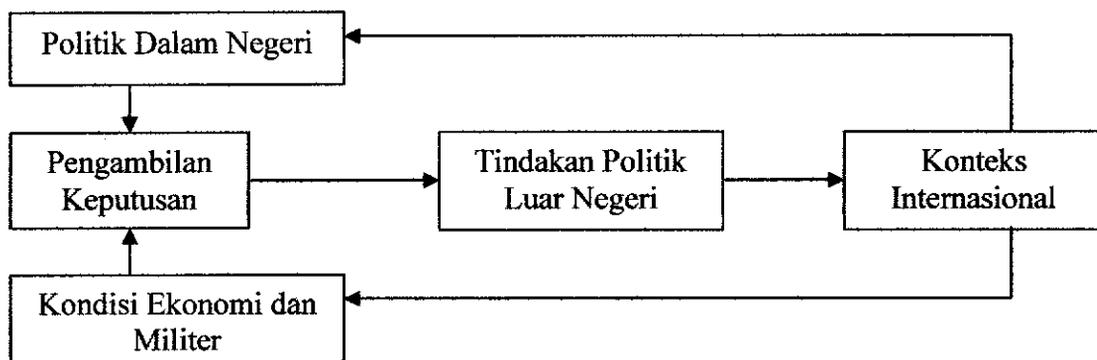
sedikit tekanan internasional yang bertubi-tubi yang diarahkan kepada pemerintahan Ariel Sharon dan negara Israel.

William D. Coplin menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam menentukan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (a) kondisi ekonomi dan militer, (b) politik dalam negeri, dan (c) konteks internasional.<sup>15</sup> Interaksi faktor-faktor itulah yang menghasilkan tindakan dalam pengambilan kebijakan, digambarkan skema sebagai berikut :

**Gambar/Tabel 1**

**Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri**

**William D. Coplin**



( Sumber : William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992.)

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bisa dijelaskan mengenai apa saja yang melatar belakangi kebijakan yang diambil PM Ariel Sharon terhadap Palestina:

<sup>15</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30.

### a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Pada pemilu bulan Januari 2003, Partai Likud berhasil memperoleh 30,8 % suara atau 37 kursi dari 120 kursi Knesset. Perolehan ini jauh melampaui perolehan kursi saingan utamanya Partai Buruh yang hanya mengantungi 15,8 % suara atau 19 kursi Knesset.<sup>16</sup> Dengan kemenangan tersebut maka Ariel Sharon terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Israel setelah sebelumnya ia menjadi Perdana Menteri Israel pada 2001.

Pada tahun 2003 terdapat partai-partai kanan dan agama (koalisi partai Likud) yang mendukung berdirinya Negara Palestina, yang meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza dan menganggap bahwa pemukiman Yahudi akan terus menciptakan perlawanan dari militan Palestina. Partai-partai tersebut adalah partai Yisrael Ba'aliya (empat kursi Knesset), Unitet Torah Judaism (lima kursi), dan Partai Nasional Agama/NRP (lima kursi). Sedangkan Partai Likud memiliki 37 kursi di Knesset.<sup>17</sup>

Partai Buruh selalu menekankan agar menempuh jalan damai dengan Palestina. Hal itu dimulai sudah dari ketika dicapainya Kesepakatan Oslo sampai dengan Perundingan Camp David II tahun 2000. Salah satu syarat Kesepakatan Oslo adalah membekukan pembangunan pemukiman Yahudi di Jalur Gaza.

---

<sup>16</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/30/in/105557.htm>, "Sharon Serukan Bentuk Pemerintah Persatuan", diakses pada tanggal 23 september 2006

<sup>17</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/26/In/apem03.htm>, "PM Israel Ariel Sharon Bentuk Koalisi Kanan", diakses pada tanggal 23 september 2006.

Partai Meretz yang juga beraliran kiri juga mendukung berdirinya Negara Palestina merdeka, berdaulat penuh, seperti layaknya negara-negara lain dengan ibu kota Jerusalem Timur dan Menganggap pembangunan pemukiman Yahudi merupakan penghambat kesepakatan damai dan final antara Israel dan Palestina.

Di sisi lain, organisasi-organisasi non pemerintah (NGOs) dan bahkan minoritas Israel sendiri melihat bahwa pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah itu melanggar hukum internasional karena telah mempersulit dan membuat menderita penduduk Palestina. Contoh LSM Israel yang selalu menentang pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza adalah B'tselem dan Peace Now.

#### **b. Kondisi Ekonomi dan Militer**

Gelombang aksi kekerasan Israel-Palestina yang kemudian populer dengan nama "Intifada Al Aqsa", bergulir begitu cepat dan luas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Istilah Intifada Al Aqsa muncul lantaran pemicunya adalah kunjungan Ariel Sharon ketika menjabat sebagai ketua partai Likud ke masjid Al Aqsa pada tanggal 28 September 2000.<sup>18</sup> Dalam 18 bulan pertama, yang menjadi korban dari Intifada Al Aqsa meliputi 1000 lebih orang palestina dan 250 orang Israel.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Musthafa Abd. Rahman, *Jejak-Jejak Juang Palestina : DariOslo Hingga Intifadah Al Aqsa*, Kompas, Jakarta, Agustus, 2002, hal. 281.

<sup>19</sup> <http://electronicintifada.net/v2/article3131.shtml>, "Sharon and Abbas Hold Summit, Call For End of Violence", diakses pada tanggal 21 september 2006

Sekeras apapun pasukan Israel melakukan “pembersihan-pembersihan” di kota-kota yang diduga sarang pejuang Palestina dimana Israel menggunakan istilah teroris, tetapi serangan balasan terutama bom bunuh diri dari Palestina masih tetap terjadi.

Ketidakstabilan keamanan yang diakibatkan serangan bom bunuh diri militan Palestina telah menyebabkan kemerosotan dan ketidakstabilan ekonomi Israel. Selama masa Intifada Al Aqsa dari tahun 2000 sampai 2004, Israel telah mengalami penurunan tingkat pertumbuhan GDP yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya Intifada Al Aqsa.

Pemerintah Israel juga telah menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk membangun dan menjaga perkampungan-perkampungan Yahudi di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Banyak kalangan militer menganggap bahwa pembangunan Jalur Gaza adalah hal yang sia-sia dan hanya menghambur-hamburkan dana. Hal ini sangat jelas terlihat dari jumlah populasi penduduk dan pemukiman yang dibangun Israel di Jalur Gaza dibandingkan dengan di Tepi Barat. Tahun 2003 terdapat 7.556 penduduk Israel di Jalur Gaza, sedangkan di Tepi Barat pada Tahun 2003 terdapat 224.669 dan mengalami kenaikan menjadi 234.487 penduduk Israel pada tahun 2004.<sup>20</sup> Di jalur Gaza terdapat sekitar 17 pemukiman sedangkan di Tepi Barat terdapat sekitar 150 pemukiman Yahudi. Dilihat dari segi wilayah Jalur Gaza juga jauh lebih kecil daripada Tepi Barat.

---

<sup>20</sup> [http://www.fmep.org/settlement\\_info/stats\\_data/west\\_bank\\_settlements.html](http://www.fmep.org/settlement_info/stats_data/west_bank_settlements.html), “Settlements in the West Bank”, diakses pada tanggal 23 september 2006

Dengan melepas Jalur Gaza maka pemerintah Israel dapat lebih konsentrasi secara ekonomi dan militer untuk memperkuat penduduknya di Tepi Barat. Aliran dana untuk pembangunan pemukiman-pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dapat dialihkan untuk pembangunan pemukiman Yahudi dan penjagaan keamanan dan militer di Tepi Barat.

### **c. Konteks Internasional**

Kecemasan dan tekanan internasional terus terjadi baik dari negara-negara Arab, Uni Eropa, AS, PBB serta negara-negara lain dalam kaitannya dengan kepemimpinan dan tindakan sewenang-wenang Ariel Sharon terhadap Warga Palestina. Banyak dari tindakan Ariel Sharon yang sudah dicap oleh dunia dan organisasi Internasional sebagai kejahatan perang. Tindakan-tindakan tersebut antara lain penyerangan ke kota-kota Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, membunuh warga dari Palestina yang dianggap oleh militer Israel sebagai teroris serta menyerbu markas dari pemimpin Palestina, Yasser Arafat serta membangun pemukiman-pemukiman di tanah penduduk dari Jalur Gaza maka akan dapat mengendurkan kecemasan dan tekanan dari dunia internasional.

Faktor lain adalah bagian dari rencana perdamaian "Road Map" yang diusulkan oleh AS sejak tahun 2002 dan didukung oleh PBB, Uni Eropa dan Rusia.

## **F. Hipotesa**

PM Ariel Sharon yang dikenal sebagai seorang yang sangat sulit berkompromi Palestina, melunak setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri pada Pemilu 2003 yang kedua kalinya membuat kebijakan akan menarik Pemukim Yahudi, karena:

1. Perubahan Konstelasi Organisasi Politik dalam Pengambilan Kebijakan.
2. Rasionalitas Kepentingan Nasional.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Penulisan skripsi ini ditetapkan jangkauan penelitian tentang kepemimpinan Politik Luar Negeri terhadap Palestina dimulai sejak Ariel Sharon terpilih menjadi Perdana Menteri Israel 2001-2003 sampai pada munculnya kebijakan Ariel Sharon untuk menarik semua Pemukim Yahudi. Bidang-bidang lainnya meliputi gelombang kekerasan Intifada Al Aqsa sejak tahu 2000, awal kemunculan rencana perdamaian "Road Map" pada bulan April 2003, serta pada saat diumumkannya kebijakan penarikan Ariel Sharon pada bulan Februari 2004.

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis menitikberatkan pada studi perpustakaan (*library research*). Dengan studi perpustakaan ini, penulis berharap nantinya bisa menemukan data-data dan fakta-fakta yang kiranya bisa

dipakai dalam mengupas masalah ini. Sumber data yang penulis gunakan berasal dari berbagai literature, buku, majalah, koran dan internet yang relevan dengan masalah ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini direncanakan akan terdiri dari lima bagian. Masing-masing bagian akan membahas persoalan sebagai berikut :

Bab Pertama, Pada bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang sejarah negara Israel dan negara Palestina, akar konflik Israel – Palestina hingga proses perdamaian Israel – Palestina.

Bab Ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang perjalanan Ariel Sharon dalam politik Israel dan dinamika politik partai tempat Ariel Sharon bernaung yaitu partai Likud serta perkembangan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Bab Keempat, pada bab ini penulis akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan PM Israel Ariel Sharon mengeluarkan kebijakan penarikan atas pemukim Yahudi di Jalur Gaza dan Bab Kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang merangkul, isi seluruh bab yang ada.